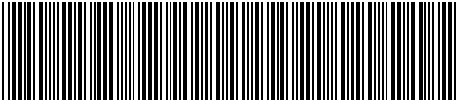


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
I A. INFORMASI KINERJA



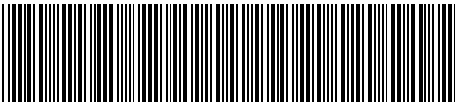
DS:5013-7195-5815-4506

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				18.638.041.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				18.638.041.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			8,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 16.143.868.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah			2.00 Laporan 166.250.000
		02	EBA.002	Layanan Kerja Sama			1.00 Laporan 35.170.000
		03	EBA.956	Layanan BMN			1.00 Layanan 10.000.000
		04	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			1.00 Layanan 364.699.000
		05	EBA.959	Layanan Protokoler			1.00 Layanan 163.800.000
		06	EBA.962	Layanan Umum			1.00 Layanan 56.850.000
		07	EBA.994	Layanan Perkantoran			1.00 Layanan 15.347.099.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			126,00 Unit, m2, Paket 1.281.950.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal			126.00 Unit 1.281.950.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			97,00 Orang, Layanan, Rekomendasi 346.368.000
Rincian Output	:	01	EBC.001	Layanan Manajemen SDM Internal			1.00 Layanan 77.568.000
		02	EBC.954	Layanan Manajemen SDM			96.00 Orang 268.800.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			15,00 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi 865.855.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah			2.00 Laporan 386.225.000
		02	EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah			3.00 Dokumen 87.720.000
		03	EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan			2.00 Laporan 206.530.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5013-7195-5815-4506

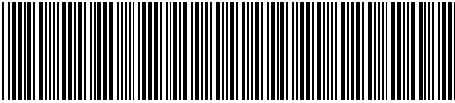
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
04	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Laporan	49.500.000
05	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	19.000.000
06	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Laporan	87.740.000
07	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Laporan	29.140.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
I B. SUMBER DANA



DS:5013-7195-5815-4506

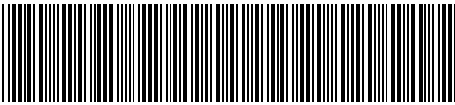
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	18.638.041.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	18.638.041.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



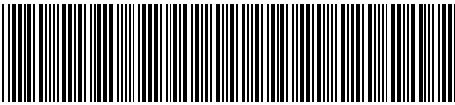
DS:5013-7195-5815-4506

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692011	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	11.555.152	5.827.939	1.254.950	-	-	18.638.041	08 . 55	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	11.555.152	5.827.939	1.254.950	-	-	18.638.041		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	11.555.152	5.827.939	1.254.950	-	-	18.638.041		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	11.555.152	4.588.716	-	-	-	16.143.868		
01	RM	11.555.152	4.588.716	-	-	-	16.143.868		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	27.000	1.254.950	-	-	1.281.950		
01	RM	-	27.000	1.254.950	-	-	1.281.950		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	346.368	-	-	-	346.368		
01	RM	-	346.368	-	-	-	346.368		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	865.855	-	-	-	865.855	08 . 55	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5013-7195-5815-4506

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

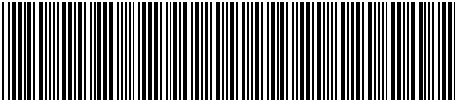
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	865.855	-	-	-	865.855	010@	
JUMLAH		11.555.152	5.827.939	1.254.950	-	-	18.638.041		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5013-7195-5815-4506

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

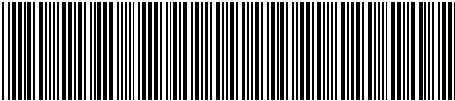
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692011	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.446.575	1.445.266	2.729.040	1.445.259	1.447.090	1.448.279	1.445.585	1.447.090	1.447.090	1.445.266	1.445.259	1.446.242	18.638.041
		BELANJA PEGAWAI	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	963.043	11.555.152
		BELANJA BARANG	483.656	482.347	511.171	482.340	484.171	485.360	482.666	484.171	484.171	482.347	482.340	483.199	5.827.939
		BELANJA MODAL	0	0	1.254.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.950
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.446.575	1.445.266	2.729.040	1.445.259	1.447.090	1.448.279	1.445.585	1.447.090	1.447.090	1.445.266	1.445.259	1.446.242	18.638.041
		51 BELANJA PEGAWAI	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	963.043	11.555.152
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	483.656	482.347	511.171	482.340	484.171	485.360	482.666	484.171	484.171	482.347	482.340	483.199	5.827.939
		53 BELANJA MODAL	0	0	1.254.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.950

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
IV A. B L O K I R



DS:5013-7195-5815-4506

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692011] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

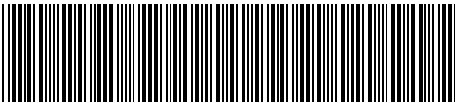
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692011	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 776.227		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.200
	52 Belanja Barang Rp. 776.227		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.440
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 377.673	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.925		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 94.383		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.250		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 232.356		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
IV B. C A T A T A N



DS:5013-7195-5815-4506

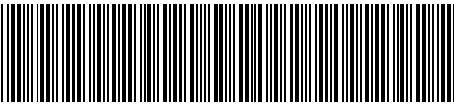
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692011] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692051/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
- Sebesar : Rp. 3.482.602.000 (TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 3.482.602.000
Rp. 3.482.602.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 3.482.602.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 3.482.602.000

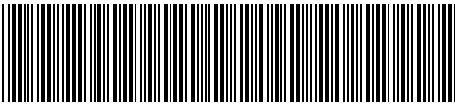
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7714-1450-0207-2410

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

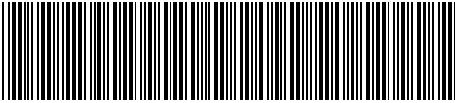
Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				3.482.602.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				3.482.602.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan				
	:	2. 01	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah				
	:	3. 01	Persentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5,00	layanan	2.501.045.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4.00	layanan	2.406.805.000
	:	02	BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1.00	layanan	94.240.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	1.890.000
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1.00	Perkara	1.890.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7,00	Lembaga	979.667.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	7.00	Lembaga	979.667.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025
I B. SUMBER DANA



DS:7714-1450-0207-2410

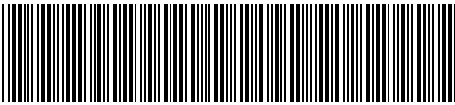
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	3.482.602.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	3.482.602.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7714-1450-0207-2410

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

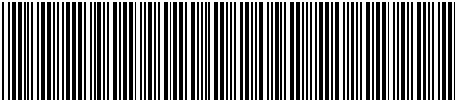
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692051	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	-	3.482.602	-	-	-	3.482.602	08 . 55	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.482.602	-	-	-	3.482.602		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	3.482.602	-	-	-	3.482.602		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	2.501.045	-	-	-	2.501.045		
04	PNBP	-	2.501.045	-	-	-	2.501.045		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	1.890	-	-	-	1.890		
04	PNBP	-	1.890	-	-	-	1.890		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	979.667	-	-	-	979.667		
04	PNBP	-	979.667	-	-	-	979.667	010@	
JUMLAH		-	3.482.602	-	-	-	3.482.602		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7714-1450-0207-2410

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

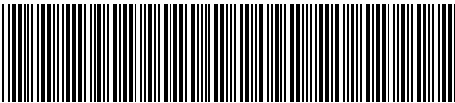
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692051	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	426.922	447.994	212.075	360.303	474.305	251.130	453.232	107.079	109.775	504.151	135.637	3.482.602
		BELANJA BARANG	0	426.922	447.994	212.075	360.303	474.305	251.130	453.232	107.079	109.775	504.151	135.637	3.482.602
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	426.922	447.994	212.075	360.303	474.305	251.130	453.232	107.079	109.775	504.151	135.637	3.482.602
	135.04.BF.7110	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	426.922	447.994	212.075	360.303	474.305	251.130	453.232	107.079	109.775	504.151	135.637	3.482.602

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025
IV A. B L O K I R



DS:7714-1450-0207-2410

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692051] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

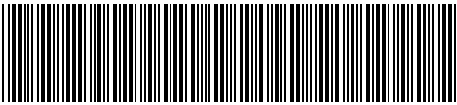
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692051	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.025
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.249.838		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	52 Belanja Barang Rp. 1.249.838	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 59.162
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 570.056		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.900		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 254.208		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127.272		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.215		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7714-1450-0207-2410

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692051] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

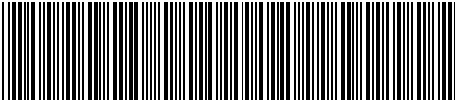
Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2700-3042-9938-0490

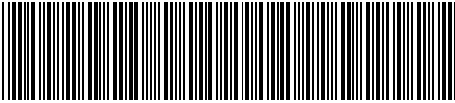
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

										Halaman : I A. 1	
Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen							321.693.000	
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah							321.693.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti								
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM					4,00	Rekomendasi Kebijakan		312.056.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				4.00	Rekomendasi Kebijakan		312.056.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi					30,00	orang		9.637.000
Rincian Output	:	01	AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum				30.00	orang		9.637.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025
I B. SUMBER DANA



DS:2700-3042-9938-0490

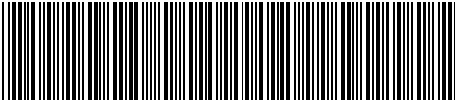
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	321.693.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	321.693.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2700-3042-9938-0490

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

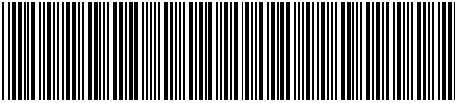
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693133	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	-	321.693	-	-	-	321.693	08 . 55	
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	321.693	-	-	-	321.693		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	321.693	-	-	-	321.693		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	312.056	-	-	-	312.056		
01	RM	-	312.056	-	-	-	312.056		
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	9.637	-	-	-	9.637		
01	RM	-	9.637	-	-	-	9.637	010	
JUMLAH		-	321.693	-	-	-	321.693		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2700-3042-9938-0490

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

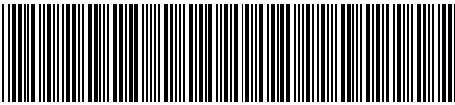
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693133	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	54.992	52.150	34.440	42.600	18.800	45.267	27.650	29.635	16.159	0	0	321.693
		BELANJA BARANG	0	54.992	52.150	34.440	42.600	18.800	45.267	27.650	29.635	16.159	0	0	321.693
		Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	54.992	52.150	34.440	42.600	18.800	45.267	27.650	29.635	16.159	0	0	321.693
	135.12.WA.7143	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	54.992	52.150	34.440	42.600	18.800	45.267	27.650	29.635	16.159	0	0	321.693

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025
IV A. B L O K I R



DS:2700-3042-9938-0490

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693133] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

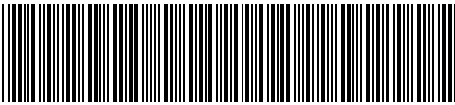
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693133	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 131.583		
	52 Belanja Barang Rp. 131.583		
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.833		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.750		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025
IV B. C A T A T A N



DS:2700-3042-9938-0490

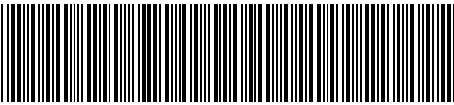
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693133] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693099/2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (135) | KEMENTERIAN HUKUM |
| 2. Unit Organisasi | : | (11) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : | (08) | SUMATERA BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (693099) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT |
| Sebesar | : | Rp. 1.664.556.000 | (SATU MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	1.664.556.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- | | | |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN P A D A N G | (010) Rp. | 1.664.556.000 |
|---------------------|-----------|---------------|

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

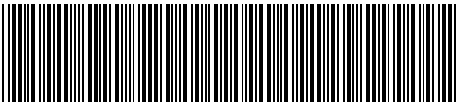
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025



Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	139.438.000
BB.7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	139.438.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.525.118.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	1.525.118.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
I A. INFORMASI KINERJA



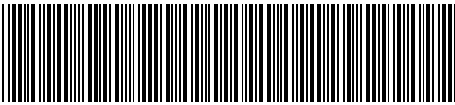
DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				139.438.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah				139.438.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan				
	:	2. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan		55.865.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan		55.865.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga		83.573.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga		83.573.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				1.525.118.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				1.525.118.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah				
	:	2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi				
	:	3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah				
	:	4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10,00	Lembaga		168.333.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	10.00	Lembaga		168.333.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat		100.298.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat		67.186.000
	:	02 BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	5,00	Kelompok Masyarakat		33.112.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2605-7594-2626-8082

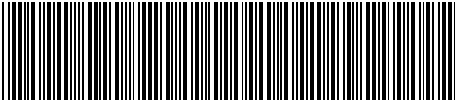
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat					Kelompok Masyarakat		
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	1,00	Orang	5.925.000
Rincian Output		:	01 BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	1,00	Orang	5.925.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	12,00	Lembaga	126.697.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	12,00	Lembaga	126.697.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	28.445.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	1,00	dokumen	28.445.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	10.040.000
Rincian Output		:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1,00	Laporan	10.040.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	117,00	Orang	936.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	117,00	Orang	936.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	14,00	Kelompok Masyarakat	149.380.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	14,00	Kelompok Masyarakat	149.380.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
I B. SUMBER DANA



DS:2605-7594-2626-8082

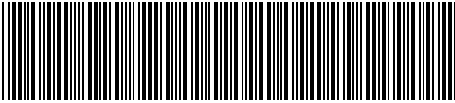
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.664.556.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	1.664.556.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



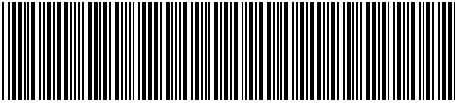
DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693099	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	-	1.660.556	4.000	-	-	1.664.556	08 . 55	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	139.438	-	-	-	139.438		
7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	139.438	-	-	-	139.438		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	55.865	-	-	-	55.865		
01 RM		-	55.865	-	-	-	55.865		
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	83.573	-	-	-	83.573		
01 RM		-	83.573	-	-	-	83.573		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.521.118	4.000	-	-	1.525.118		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	1.521.118	4.000	-	-	1.525.118		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	164.333	4.000	-	-	168.333		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

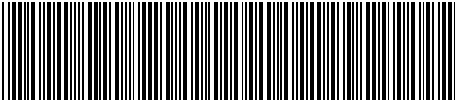


DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	164.333	4.000	-	-	168.333	010@	
7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	100.298	-	-	-	100.298	08 . 55	
01 RM		-	100.298	-	-	-	100.298	010@	
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	5.925	-	-	-	5.925	08 . 55	
01 RM		-	5.925	-	-	-	5.925	010	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	126.697	-	-	-	126.697	08 . 55	
01 RM		-	126.697	-	-	-	126.697	010@	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	28.445	-	-	-	28.445	08 . 55	
01 RM		-	28.445	-	-	-	28.445	010@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

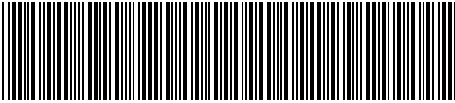
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	10.040	-	-	-	10.040	08 . 55	
01 RM		-	10.040	-	-	-	10.040	010@	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	936.000	-	-	-	936.000	08 . 55	
01 RM		-	936.000	-	-	-	936.000	010	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	149.380	-	-	-	149.380	08 . 55	
01 RM		-	149.380	-	-	-	149.380	010	
JUMLAH		-	1.660.556	4.000	-	-	1.664.556		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

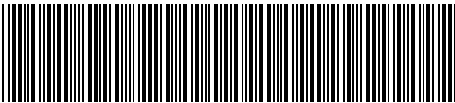
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693099	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	133.764	133.764	134.148	136.787	137.787	139.887	133.764	133.764	133.764	133.764	133.764	179.600	1.664.556
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	133.431	133.431	133.815	136.454	137.454	139.554	133.431	133.431	133.431	133.431	133.431	179.263	1.660.556
		BELANJA MODAL	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4.000
		Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	7.772	7.772	7.772	9.172	10.172	12.272	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	45.646	139.438
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.772	7.772	7.772	9.172	10.172	12.272	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	45.646	139.438
		135.11.BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	125.992	125.992	126.376	127.615	127.615	127.615	125.992	125.992	125.992	125.992	125.992	133.954
52 BELANJA BARANG DAN BARANG	125.659	125.659	126.043	127.282	127.282	127.282	125.659	125.659	125.659	125.659	125.659	125.659	133.617	1.521.118	
	53 BELANJA MODAL	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
IV A. B L O K I R

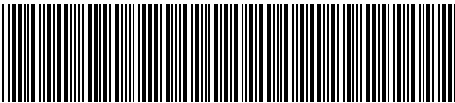


DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693099] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693099	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 193.818	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	52 Belanja Barang Rp. 193.818	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.494
7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.752		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.750
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 750		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.000
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.439		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.367
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 450		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.650
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.490		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.576
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
IV A. B L O K I R



DS:2605-7594-2626-8082

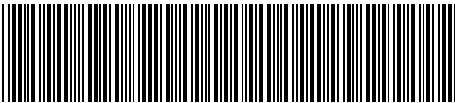
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693099] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7136.BMA	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Data dan Informasi Publik		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.700 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.500 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.900 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
IV B. C A T A T A N



DS:2605-7594-2626-8082

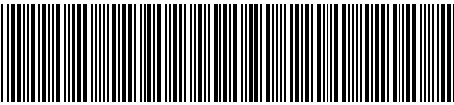
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693099] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001



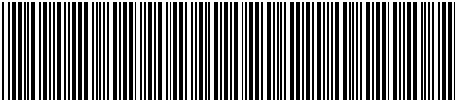
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.692998/2025**

</

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9234-1214-2505-6453

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

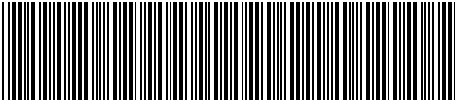
Halaman : I A. 1

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				2.183.394.000	
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				2.183.394.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah					
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah					
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		1.650,00	Orang	2.112.239.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah		1150.00	Orang	1.520.740.000
		02	BDC.002	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		350.00	Orang	531.649.000
		03	BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		150.00	Orang	59.850.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BKB	Pemantauan produk		4,00	Produk, Layanan	71.155.000
Rincian Output	:	01	BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		4.00	Layanan	71.155.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025
I B. SUMBER DANA



DS:9234-1214-2505-6453

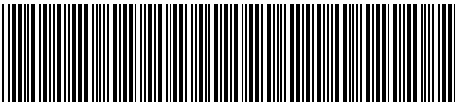
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.183.394.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	2.183.394.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9234-1214-2505-6453

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

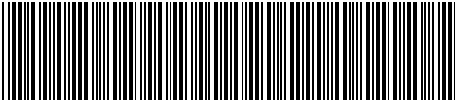
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692998	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	-	2.183.394	-	-	-	2.183.394	08 . 55	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.183.394	-	-	-	2.183.394		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.183.394	-	-	-	2.183.394		
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	2.112.239	-	-	-	2.112.239		
04	PNBP	-	2.112.239	-	-	-	2.112.239		
7121.BKB	Pemantauan produk (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	71.155	-	-	-	71.155		
04	PNBP	-	71.155	-	-	-	71.155	010@	
JUMLAH		-	2.183.394	-	-	-	2.183.394		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9234-1214-2505-6453

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

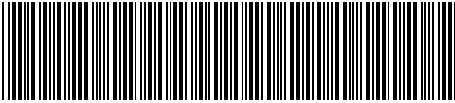
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692998	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	44.973	139.684	209.567	75.182	85.953	58.823	184.596	47.896	1.162.960	69.222	54.225	50.313	2.183.394
		BELANJA BARANG	44.973	139.684	209.567	75.182	85.953	58.823	184.596	47.896	1.162.960	69.222	54.225	50.313	2.183.394
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	44.973	139.684	209.567	75.182	85.953	58.823	184.596	47.896	1.162.960	69.222	54.225	50.313	2.183.394
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	44.973	139.684	209.567	75.182	85.953	58.823	184.596	47.896	1.162.960	69.222	54.225	50.313	2.183.394
			</												

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025
IV A. B L O K I R



DS:9234-1214-2505-6453

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692998] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

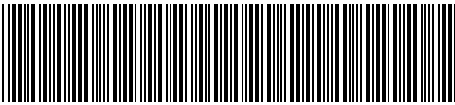
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692998	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 956.890		
	52 Belanja Barang Rp. 956.890		
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 272.610		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.700		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 507.136		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 131.284		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7121.BKB	Pemantauan produk		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.160		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9234-1214-2505-6453

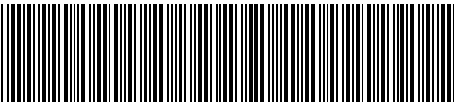
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692998] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

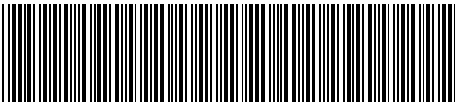


**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693031/2025**

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8525-8311-1363-8512

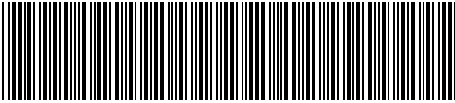
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi						700.000.000	
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah						700.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan							
		2. 01	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum							
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				56,00	Rekomendasi Kebijakan	536.934.000	
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah			56.00	Rekomendasi Kebijakan	536.934.000	
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM				30,00	Orang	150.898.000	
Rincian Output	:	01	ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah			30.00	Orang	150.898.000	
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	12.168.000	
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah			1.00	Laporan	12.168.000	

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025
I B. SUMBER DANA



DS:8525-8311-1363-8512

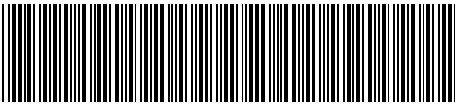
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	700.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	700.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8525-8311-1363-8512

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

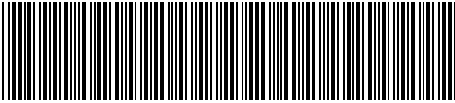
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693031	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	-	700.000	-	-	-	700.000	08 . 55	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	700.000	-	-	-	700.000		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	700.000	-	-	-	700.000		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	536.934	-	-	-	536.934		
01	RM	-	536.934	-	-	-	536.934		
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	150.898	-	-	-	150.898		
01	RM	-	150.898	-	-	-	150.898		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	12.168	-	-	-	12.168		
01	RM	-	12.168	-	-	-	12.168		
JUMLAH		-	700.000	-	-	-	700.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8525-8311-1363-8512

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

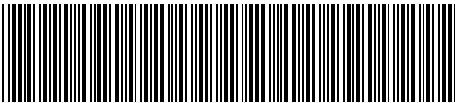
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	693031	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT														
		RENCANA PENARIKAN DANA	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	59.393	61.167	700.000
		BELANJA BARANG	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	59.393	61.167	700.000
		Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	59.393	61.167	700.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	59.393	61.167	700.000
															</	

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025
IV A. B L O K I R



DS:8525-8311-1363-8512

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693031] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

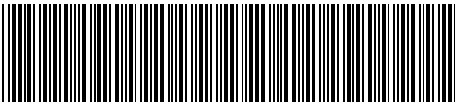
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693031	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.190
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 125.439		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	52 Belanja Barang Rp. 125.439		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.979
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.853		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.215		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.902		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 900		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025
IV B. C A T A T A N



DS:8525-8311-1363-8512

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693031] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001